

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Dalam Triwulan III (Juli – September) 2025, tantangan yang dihadapi oleh TPID dalam upaya pengendalian harga kebutuhan pokok yaitu telah memasuki puncak musim kemarau dimana produksi beberapa kebutuhan pokok mulai berkurang terutama beras. Disamping itu ada moment Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 1 (satu) bulan penuh yang bisa mempengaruhi sisi permintaan (demand) yang tinggi terutama beras, bahan-bahan rempah (ragi) dan aneka daging, terutama daging ayam dan daging sapi.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Tim TPID sedini mungkin menerapkan strategi untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok agar terjamin ketersediaannya sehingga tidak menimbulkan gejolak harga yang melonjak tinggi yang akan menaikkan tingkat IPH dan Inflasi Kawasan.

Ada beberapa kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim TPID yaitu menggalakkan penyaluran sembako dan gelar pasar murah (GPM) serta pemantauan harga rutin di pasar.

Dari kegiatan tersebut dan berdasarkan hasil dari pemantauan berkala harga Bahan Kebutuhan Pokok yang ada di Kabupaten Lombok Timur pada Triwulan III Tahun 2025 ini, dijadikan sebagai input untuk perhitungan IPH sebagai proxy inflasi di daerah Non IHK. Dari hasil pemantauan harga awal tahun atau Triwulan III tahun 2025 dapat dilaporkan sebagai berikut :

Juli				Agustus				September			
M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
3.57	2.05	1.02	(0.20)	(3.61)	(3.56)	(3.60)	(3.64)	(0.26)	(0.31)	0.03	-

Dari Tabel Indeks Perkembangan Harga (IPH) tersebut diatas IPH tertinggi di Kabupaten Lombok Timur terjadi pada minggu I bulan Juli 2025 sebesar 3,57 dan terendah pada Minggu IV bulan Agustus sebesar - 3,64.

Adapun komoditas penyumbang Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Lombok Timur yaitu :

- Bawang Merah
- Cabai Rawit
- Daging Ayam Ras

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan

1. Kenaikan harga komoditas, cabai rawit, bawang merah dan daging ayam ras.

Setiap pergantian musim tanam kedua jenis komoditas ini yaitu cabai dan beras menjadi komoditas yang terpengaruh langsung dimana cabai yang merupakan tanaman musim kering

dengan mulai masuknya musim hujan produktivitas dan luas tanamnya mulai menurun. Sedangkan beras saat awal musim penghujan baru memulai melaksanakan penanaman sehingga tidak dapat memasok kebutuhan beras pada bulan Januari.

2. Sistem Informasi Pangan

Peranan Sistem Informasi Pangan sangat dibutuhkan sebagai EWS (Early Warning System) untuk mengatasi resiko terganggunya pasokan komoditas pada saat-saat tertentu, sehingga pengambil kebijakan dapat merumuskan solusi penanganan secara tepat dan terarah.

3. Belum efektifnya kerjasama antar daerah (KAD) dalam mendukung ketersediaan stock pangan daerah.

Kerjasama antar Daerah yang telah terjalin perlu ditindak lanjuti dan diperkuat dengan mendorong Kerjasama antara pelaku ekonomi (B to B) sehingga akan semakin memperkuat jaringan distribusi dan pasokan barang antar wilayah, baik antara daerah penghasil (pemasok) dan daerah yang mengalami gangguan produksi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun beberapa kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Mengintensipkan Operasi pasar

Salah satu upaya yang dilakukan pemerinatah daerah dalam rangka menjaga kestabilan harga barang di daerah yaitu dengan melakukan operasi pasar (OP) dengan harga petani terutama cabai rawit bekerjasama dengan “Champion Cabe” di daerah, sedangkan beras dilakukan Kerjasama dengan Bulog.

2. Melaksanakan pemantauan harga secara berkala dan Sidak Pasar

Melalui sistem yang sudah berjalan yaitu SIHP Dinas Ketahanan Pangan dan Tim TPID secara berkala melaksanakan pemantauan harga dan sidak pasar agar komoditas pangan yang sering mengalami fluktuasi harga terpantau dengan baik.

3. **Komunikasi dan Koordinasi Kerjasama antar daerah dalam penangan inflasi**

Membangun komitmen melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang telah terjalin dengan beberapa Kabupaten Penghasil yang ada di wilayah Propinsi maupun dengan Kabupaten/Kota dan Propinsi lainnya.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Memberikan Stimulus dari APBD berupa Subsidi Bunga Bank untuk Pembiayaan Usaha Tani dan Peternakan dan Fasilitas Pembiayaan Operasi Pasar dari BTT serta Bansos Pangan.**

Program ini sudah berjalan dengan baik khususnya di bidang peternakan dan UMKM, perlu

komitmen bersama untuk perluasan jangkauan kepada usaha pertanian dapat diserap lebih banyak. Disamping itu penyaluran Bansos Pangan agar yang telah berjalan sebelum dilanjutkan terutama pada saat Hari Raya dan Hari Besar Keagamaan lainnya (saat Fix Season).

2. Kegiatan Penanganan Inflasi secara Periodik oleh TPID

Kegiatan-kegiatan koordinasi di Sekretariat TPID sudah berjalan dengan baik namun perlu adanya Fasilitasi dan Penguatan Anggaran dari APBD untuk mendukung upaya penanganan intervensi langsung tat kala harga kebutuhan pokok menunjukkan gejala kenaikan harga sehingga dapat diantisipasi dengan cepat.

3. Komunikasi dan Koordinasi Kerjasama antar daerah dalam penanganan inflasi

Telah terjalin Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kota Mataram dan Kota Bima perlu ditindaklanjuti dengan Kerjasama B to B sehingga Kerjasama yang ada dapat berjalan dengan optimal.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dukungan yang kuat dari pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Operasi Pasar
2. Fasilitasi pemerintah untuk mendukung penguatan permodalan pengusaha yang dilibatkan dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mendukung pengutan stok pangan daerah
3. Peningkatan SDM numerator dalam monitoring harga.